

SR. Penegarian EXPW/ Sri Gobron

No. : 72/UHK3/1968.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Februari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kur-sus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetja-han dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967.

MENIMPANG, bahwa:

- a. daerah-daerah jang bersangkutan membutuhkan Perambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadujukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- c. Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pem-binaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Dae-rah;
- d. sjarat-sjarat pendirian S.M.P. jang sudah dipenuhi;
- e. berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaran 1967.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terahir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udji-an penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
5. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian seko-lah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

P e r t a m a : memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", se-landjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti jang tertjantum dalam laporan I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri, baik setjera administratif maupun setjera edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam laporan II surat keputusan ini menjadi S.M.P.Negeri setempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan keten-tuan-lketentuan sebagai berikut:

- la. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perleng-kapan lainnya didjari dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengka-paan lainnya jang dimaksud dalam ajat la, dicerahkan se-penuhnya kepada Dap. P. dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri jang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
- c. Perlengkapan lain untuk memenuhi standard S.M.P. jang djumlah kelasnya 12 (duabelas), masih tetep menjadi tang-gung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

SR. Penegonian *EWW & Sri Gobron*

No. : 72/UKK3/1968.

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DJAKARTA, 21 Februari 1968.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

TELAH MEMBATJA:

surat kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuruan dan Kur-sus2 tanggal 30 Desember 1967 No.1565/IV/11/DSMP/67 tentang usul pemetja-han dan penegerian S.M.P. tahun adjaran 1967.

MENIRANG, bahwa:

- a. daerah-daerah jang bersangkutan membutuhkan Penambahan S.M.P. Negeri sesuai dengan laporan Kepala Daerah setempat;
- b. usaha persiapan dan permintaannya sudah diadujukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No. 19/1967;
- c. Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk membina pendidikan dalam arti pem-binaan fasilitas materiilnya dan integrasinya dengan pembangunan Dae-rah;
- d. sjarat-sjarat pendirian S.M.P. jang sudah dipenuhi;
- e. berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu menambah pemetjahan dan penegerian S.M.P. pada tahun adjaran 1967.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo. Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terahir tentang menjelenggarakan dan mendirikan Sekolah Landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P.K. tanggal 15 April 1957 No. 38880/S jo. 1959 No.125409/S. tentang peraturan umum udjian masuk dan udji-an penghabisan Sekolah Landjutan Negeri;
5. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967 tentang Peraturan tentang tata-tjara pembukaan dan/atau penegerian seko-lah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

P e r t a m a : memetjah "Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri", se-landjutnya disingkat S.M.P.Negeri, ditempat-tempat seperti jang tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah Negeri jang masing-masing berdiri sendiri, baik setjara administratif maupun setjara edukatif;

K e d u a : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi S.M.P.Negeri satempat;

K e t i g a : terhadap pasal-pasal "Pertama" dan "Kedua" ditetapkan keten-tuan-ketentuan sebagai berikut:

- la. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perleng-kapan lainnya didijerin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. Gedung, halaman sekolah, mobiler dan alat-alat perlengka-paan lainnya jang dinaksud dalam ajat la, dicerahkan se-penuhnya kepada Bap. P.dan K. guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri jang bersangkutan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
- c. Perlengkapan2 lain untuk memenuhi standard S.M.P. jang djumlah kelasnya 12 (duabelas), masih tetep mendjadi tang-gung-djawab Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;

- 2a. perwakilan guru-guru didjamin atau disediakan dengan tja-ra jang lajak oleh Panitia atau Jajaran atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru jang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel bagi guru-guru jang ditanggung oleh Panitia daerah, disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah jang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru jang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudajaan;
4. Terhadap sekolah-sekolah jang dinegerikan, chususnya ter-hadap tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengajar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi jang tidak memenuhi, sjarat-penjalurannya menjadi tanggung-djawab Panitia atau Jajaran atau Pengambil inisiatif dari Sekolah jang bersangkutan;
5. Chusus bagi murid-murid jang diterima di kelas I hanjalah jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan mu-rid-murid lainnya ditutup dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Impeksi Daerah S.M.P. jang bersangkutan;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun jang sedang berdjalan mau-pun dalam tahun-tahun berikutnya harus se-izin Direktorat Djendral Pendidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Dird. en Dikdas setempat.

Ke - empat: jika sjarat-sjarat tersebut diatas ternjata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajaran, maka sewaktu-waktu Pemerintah akan menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah Negeri atau menghen-tikan untuk selanjutnya penerimaan murid di kelas I;

Ke - limat: biaja penjelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannja su-rat keputusan ini untuk tahun 1967 dan selanjutnya dibeban-kan pada mata anggaran jang selaras dengan pasal 14.2.49 dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P. dan K. tahun 1967, jaitu biaja jang tersedia untuk S.M.P.

Ke - enam: Surat Keputusan ini untuk:

- a. sekolah-sekolah di D.C.I. Djakarta-Raya mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1967,
- b. sekolah-sekolah daerah-daerah lainnya mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Sesuai dengan Daftar tersebut;  
Menteri Pendidikan dan Kebudajaan,  
Atas nama Menteri :



Kepala Direktorat Pendidikan Umum,  
Kedjuruan dan Kursus2,  
*Wasitko*  
( Drs. Waskito T.S. )

Lampiran II Surat Keputusan Menteri Pendi-  
dikan dan Kebudayaan tanggal  
21-2-1968 No.72/DIK/1968.

Tentang : Penegosian SMP.Swasta  
tahun - adjaran 1967.-

No.	Urut	Tempat dan tanggal jang dinegosiasi	Djuml. kecara	Ketegori
1.		SMP.Swasta "Neuroxa" Uleelheue, Ketjamatan Mesjidid Raya, Daerah tk.II Atjeh-Pesisir, Daerah tk.I Atjeh	5	a. Mendjadi SMP.Negri Uleelheue. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Uleelheue.
2.		SMP.Swasta "Karya" Gondopuro, Ketjamatan Gondopuro, Daerah tk.II Atjeh-Utara, Daerah tk.I Atjeh-Utara	3	a. Mendjadi SMP.Negri Gondopuro. b.,Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Gondopuro.
3.		SMP.Swasta Borbantuan Limbung, Ketjamatan Marionboho, Daerah tk.II Tapenuli-Utara, Daerah tk.I Sumotora - Utara	6	a. Mendjadi SMP.Negri Limbung. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Pengurus SMP.Swasta Borbantuan Limbung.
4.		SMP.Sotia Karjo Kutabuluh, Ketjamatan Tanah Pinem, Daerah tk.II Tapenuli-Utara, Daerah tk.I Sumotora-Utara	3	a. Mendjadi SMP.Negri Kutabuluh. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Pengurus SMP.Sotia Karjo Kutabuluh.
5.		SMP.Rokjat Sipoholon, Ketjamatan Sipoholon, Daerah tk.II Tapenuli-Utara, Daerah tk.I Sumotora-Utara	4	a. Mendjadi SMP.Negri Sipoholon. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Pengurus SMP.Rokjat Sipoholon.
6.		SMP.Harapan Salapian Tandjung- langkat, Ketj. Salapian, Daerah tk.II Langkat, Daerah tk.I Sumotora-Utara	5	a. Mendjadi SMP.Negri Tandjung langkat. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia SMP.Salapian Tandjung langkat.
7.		SMP.Pusako Mu n t o , Ketjamatan Mu n t o , Daerah tk.II K o r o , Daerah tk.I Sumotora-Utara	4	a. Mendjadi SMP Negri Mu n t o . b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia SMP.Pusako Mu n t o .
8.		SMP.Swasta Tigadjumpsa, Ketjamatan Purusajoho, Daerah tk.II Koro, Daerah tk.I Sumotora-Utara	4	a. Mendjadi SMP Negri Tigadjumpsa b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Tigadjumpsa.
9.		SMP.Swasta Pulourakjat, Ketjamatan Pulourakjat, Daerah tk.II Asahan, Daerah tk.I Sumotora-Utara	5	a. Mendjadi SMP.Negri Pulourakjat. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia SMP.Ketjamatan Pulourakjat.
10.		SMP.Swasta Posorudjungbatu Ketjamatan So s o , Daerah tk.II Tapenuli-Solistan Daerah tk.I Sumotora-Utara	3	a. Mendjadi SMP.Negri Posorudjungbatu. b. Diserah-terimakan kepada Pemerintah o.q.Dop.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP. Swasta Posorudjungbatu.
		11. & 12. Porbantuan .....		

11.	SMP.Swasta Berbantuan Pagarlam- bung, Ketjamatan Parus, Daerah tk.II Tapanuli-Tengah Daerah tk.I Sumatera-Utara	3	a. Mengjadi SMP Negeri Pagarlam- bung b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Pangurus SMP.Berbantuan Paga- lumbung.
12.	SMP.Persiapan Negeri Stabat, Ketjamatan S t a b a t , Daerah tk.II Langkat, Daerah tk.I Sumatera-Utara	3	a. Mengjadi SMP.Negeri Stabat. b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Badan Penjantun SMP Persiapa Negeri Stabat.
13.	SMP.Persiapan Negeri Padenggan- ting Ketjamatan Tanajung Emas Daerah tk.II Tanah Datar, Daerah tk.I Sumatera-Pariat	5	a. Mengjadi SMP.Negeri Padengga- ting. b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Jejasen Pond./Pomb.Tuan Kooh Padengganting.
14.	SMP.Swasta Ketj.Man Sabaris Paph- kambar, Ketj.Man Sabaris, Daerah tk.II Padang-Pariaman Daerah tk.I Sumatera - Pariat	3	a. Mengjadi SMP Negeri Paph- kambar b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Ja j. Pembangunan dan Pond.Man Sabaris Paphkambar.
5.	SMP.Swasta Sungailiesi, Ketjamatan IX Koto, Daerah tk.II Solok, Daerah tk.I Sumatera Barat.	3	a. Mengjadi SMP Negeri Sungailiesi b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari mitis Mendirikan Gedung Pend Ketj.IX Koto Sungailiesi.
16.	SMP Swasta Pantjungsosil Tapen, Ketjamatan Pantjungsosil, Daerah tk.II Posisir Solaten Daerah tk.I Sumatera Barat.	3	a. Mengjadi SMP Negeri Tapen. b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pombinaan SMP Pantju- ngsosil Tapen.
17.	SMP.Diponegoro Kumpulan, Ketjamatan Bendjal Daerah tk.II Pososman Daerah tk.I Sumatera Barat.	3	a. Mengjadi SMP Negeri Kumpulan b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Jejasen Padonglesban Kumpulan.
18.	SMP.Jejasen Pantaitjerman Surian Ketjamatan Pantaitjerman, Daerah tk.II Solok, Daerah tk.I Sumatera Barat.	3	a. Mengjadi SMP Negeri Surian b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Ja j. Pantaitjerman Surian.
19.	SMP.Swasta Berbantuan Simpongs- tenang, Ketjamatan Telompuu, Daerah tk.II Pososman, Daerah tk.I Sumatera Barat	3	a. Mengjadi SMP Negeri Simpongs- tenang b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pombino SMP Simpongs- tenang.
20.	SMP.Persiapan Negeri Tandjungs- akti Ketjamatan Tandjungsakti, Daerah tk.II La h a t , Daerah tk.I Sumatera Selatan.	4	a. Mengjadi SMP Negeri Tandjungs- akti. b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pembangunan SMP Tan- djungsakti.
21.	SMP "Telodom" Sritedjokentjono Ketjamatan Purusur, Daerah tk.II Lampung-Tengah Daerah tk.I Lampung.	3	a. Mengjadi SMP Negeri Sritedjo- kentjono. b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Koperasi Produksi Sritedjo- kentjono.
22.	SMP."Tujuhbelas" di Kotagedjah Ketjamatan Seputih Romen Daerah tk.II Lampung Tengah Daerah tk.I Lampung.	3	a. Mengjadi SMP.Negeri Kotagedja b. Diserahkan kepada Pem- rintah c.q. Dep.P dan K dari Panitia Pembangunan/Ponog.SMP "Tujuhbelas" Kotagedjah.